

Judul : 113 ribu warga alami gangguan pernapasan, komisi IV minta pemerintah perkuat layanan kesehatan
Tanggal : Selasa, 15 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

113 Ribu Warga Alami Gangguan Pernapasan **Komisi IV Minta Pemerintah Perkuat Layanan Kesehatan**

Senayan menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang telah berkembang menjadi krisis kesehatan publik. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 9 September 2026 mencatat 113.336 orang mengalami gangguan pernapasan terkait kebakaran.

ANGGOTA Komisi IV DPR Nevi Zuairina mengatakan, angka tersebut menjadi alarm serius. Terlebih, lebih dari 12,5 juta orang di tujuh provinsi terpapar asap akibat karhutla. Karena itu, Pemerintah diminta memperlakukan karhutla sebagai darurat kesehatan.

"Ketika lebih dari 100 ribu orang mengalami gangguan pernapasan akibat asap, karhutla sudah bukan sekadar persoalan lingkungan, tapi ini keadaan darurat kesehatan masyarakat," ujar Nevi di Jakarta, Minggu (13/9/2026).

Nevi meminta, Pemerintah segera memperkuat layanan kesehatan di daerah terdampak. Seperti ketersediaan masker, oksigen, obat-obatan, fasilitas kesehatan, serta informasi mengenai kualitas udara perlu dipastikan. Utamanya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan.

Menurutnya, Pemerintah tidak boleh menunggu jumlah korban terus bertambah sebelum mem-

perkuat respons. Warga tidak boleh dibiarkan menghadapi asap sendirian. Karena itu, penanganan perlu dilakukan sejak risiko kesehatan mulai meningkat.

"Negara mesti hadir memastikan masyarakat tetap bisa bernapas dengan aman dan mendapatkan layanan kesehatan ketika terdampak," tegas politisi PKS ini.

Selain itu, Nevi mendesak Pemerintah memperkuat pencegahan agar krisis serupa tidak terus berulang. Pengawasan terhadap wilayah rawan kebakaran perlu diperketat, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran harus tegas, dan perlindungan kawasan gambut menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.

"Karhutla tidak boleh menjadi bencana yang ditangani setiap tahun dengan pola yang sama. Kita mesti memutus siklusnya dari hulu, sekaligus memastikan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama," tandas legislator asal Sumatera Barat (Sumbar) ini.

Anggota Komisi VIII DPR



Nevi Zuairina

Dini Rahmania menambahkan, tawaran bantuan dari Malaysia untuk membantu penanganan karhutla bisa menjadi penambah kekuatan di tengah masih berlangsungnya penanganan karhutla di sejumlah wilayah.

Dia memahami upaya dari Pemerintah Indonesia untuk mengatasi karhutla sudah dilakukan dengan beragam cara. Namun ketika ada dukungan tambahan dari negara sahabat, hal itu perlu dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan. "Yang penting prosedurnya jelas dan bantuannya benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan," kata Dini di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, Pemerintah saat ini telah mengerahkan berbagai

langkah dalam menangani karhutla. Mulai dari operasi pemadaman di darat, pemantauan titik api, pendinginan, pengerahan sarana-prasarana, hingga penguatan operasi penanganan di wilayah prioritas.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan unsur terkait dalam menangani karhutla," kata politisi Nasdem ini.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Jubir Kemenkes) Widyawati mengatakan, sebanyak 113.336 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) secara kumulatif tercatat di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 26.545 kasus merupakan pasien usia 0-5 tahun, sedangkan 86.791 kasus berusia di atas 5 tahun.

"Kemenkes mencatat kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak karhutla berada pada kategori merah hingga hitam," ujar Widyawati di Jakarta, kemarin.

Widyawati menjelaskan, sejumlah kabupaten/kota seperti Kotawaringin Timur hingga Murung Raya di Kalimantan Tengah (Kalteng) tercatat berada pada kategori hitam. Sedangkan daerah Sintang, Banting Kota, hingga

Tebo di Kalimantan Barat (Kalbar) berada pada kategori merah.

Untuk mengantisipasi dampak kesehatan, kata dia, Kemenkes telah menyiapkan pos pelayanan kesehatan di 1.691 puskesmas, 360 rumah sakit rujukan dan mobilisasi bantuan logistik di wilayah terdampak karhutla.

Selain fasilitas kesehatan, kata Widyawati, Kemenkes juga telah mendistribusikan 980.315 masker hingga 9 September. Adapun logistik lainnya meliputi 277 oksigen konsentrator, 41 ribu pasang sarung tangan, 36 tabung oksigen, 4.908 APD, 120 face shield, sembilan air purifier, dan 248 Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

"Seluruh logistik tersebut didistribusikan ke tujuh provinsi terdampak karhutla, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan," jelasnya.

Selain itu, Widyawati mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak karhutla. "Jangan panik, kenakan masker pada saat berada di luar ruangan, pantau indeks kualitas udara, perbanyak minum air putih, kunjungi fasyankes bila muncul sesak di masyarakat," pungkasnya. ■ TIF